

## PENGEMBANGAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PERTANIAN DI KECAMATAN RAN CABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Mu'min Ma'ruf<sup>1</sup>, Ikhbaluddin<sup>2\*</sup>, Suropto<sup>3</sup>, Abdurohim<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia; e-mail: [mumin@ipdn.ac.id](mailto:mumin@ipdn.ac.id)

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia; e-mail: [ikhbaluddin@ipdn.ac.id](mailto:ikhbaluddin@ipdn.ac.id)

<sup>3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia; e-mail: [suropto@ipdn.ac.id](mailto:suropto@ipdn.ac.id)

<sup>4</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia; e-mail: [abdurohim@ipdn.ac.id](mailto:abdurohim@ipdn.ac.id)

\*Correspondence

Received: 02-03-2021; Accepted: 29-06-2021 ; Published: 30-06-2021

**Abstrak:** Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung usaha masyarakat, karena sektor ini lebih banyak menampung lapangan kerja dibandingkan sektor industri besar. Namun perhatian dari Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UKM masih belum optimal. Hal inilah yang menjadi titik temu permasalahan dalam konteks peningkatan kapasitas UKM khususnya bidang pertanian di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memberikan gambaran secara mendalam tentang pengembangan kapasitas UKM bidang pertanian dilihat berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh UNDP yakni dalam hal pengembangan kapasitas tenaga kerja atau kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan kapasitas modal (dimensi fisik), dan pengembangan teknologi. Hasil analisis menunjukkan beberapa gejala terhadap pengembangan kapasitas UKM bidang pertanian di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor masih kurang, yakni dalam hal pengembangan kapasitas tenaga kerja/SDM, sulitnya akses terhadap permodalan baik terkait pembiayaan maupun bantuan sarana dan prasarana, dan masih lemahnya kemampuan UKM dalam pengembangan teknologi dilihat dari kemampuan terhadap akses teknologi informasi serta ketersediaan jaringan komunikasi.

**Kata Kunci:** Pengembangan Kapasitas; Usaha Kecil Menengah

**Abstract:** *Small and Medium Enterprise (Usaha Kecil dan Menengah; UKM) is the backbone of the economy of society, as this sector has accommodated more jobs compared to a large industrial sector. However, the effort of local government in empowering UKM is still not optimal. This issue has become one of the problems for developing the capacity of UKM, particularly the agricultural sector, in Rancabungur District, Bogor Regency. This research aims to describe in-depth the capacity building of this UKM based on the concept developed by UNDP by using a qualitative method with a descriptive approach. Here we highlighted three point of the capacity development: the workforce or human resource (HR), the capital (physical dimension), and the technology. The results show that there are some problems in the capacity building of the UKM's agricultural sector, notably for its workforce capacity development and the difficulty to access the capital weather for financing or supporting the facilities and infrastructures of the UKM. Moreover, we found that the UKM has a lack of ability for its technology development, notably for its ability to access the information technology and the availability of communication network.*

**Keywords:** *Capacity Building; Small and Medium Enterprise*

## **I. Pendahuluan**

Gagasan otonomi daerah pada hakikatnya untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Pemerintah dalam hal ini memiliki banyak cara serta wewenang yang luas untuk merealisasikan hal tersebut, diantaranya melalui salah satu fungsinya yakni pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya fungsi serta wewenang tersebut secara berjenjang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah digolongkan dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah beserta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Dengan demikian, pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat dikategorikan sebagai *core business* program pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan dan semestinya masuk dalam kebijakan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, domain koperasi dipisahkan dan selanjutnya tidak termasuk dalam kajian penelitian, karena mengingat koperasi memiliki keunikan dan keluasan kajian sehingga memerlukan pembahasan tersendiri. Fokus pembahasan dalam penelitian ini pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM dan/atau UKM. Pengertian UKM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau juga badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

Mesti disadari oleh para penyelenggara pemerintahan daerah bahwa, kepedulian terhadap mengembangkan UKM merupakan usaha penting yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat secara langsung. Sektor UKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan melebihi serapan tenaga kerja pada sektor industri besar dan menengah. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data dari BPS untuk tahun 2016 saja mencapai 57,9 juta tenaga kerja, dan pada tahun 2017 tenaga kerja disektor UKM mencapai 115 juta lebih ([www.ukmindonesia.id/62](http://www.ukmindonesia.id/62)).

Demikian juga halnya dengan kontribusi UKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat hingga mencapai 60 % (data tahun 2017) dalam lima tahun terakhir ([www.ukmindonesia.id/62](http://www.ukmindonesia.id/62)). Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan dalam bentuk pembangunan kapasitas UKM yang lebih baik.

Konsep pembangunan kapasitas (*capacity building*) sudah lama digaungkan oleh berbagai lembaga seperti *World Bank* dan *United Nations Development Programme* (UNDP). Terminologi pembangunan kapasitas oleh sebagian ilmuwan dimaknai dengan *capacity development* atau *capacity strengthening* yang menunjukkan suatu usaha dalam mengembangkan kemampuan yang sudah ada, sedangkan istilah *structuring capacity* sebagai usaha kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*) (Haryono et al., 2012). Tujuan Pembangunan kapasitas (*capacity building*) menurut Grindle adalah untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah “*capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*” (Hilderbrand & Grindle, 1997). Tujuan tersebut jika ditarik ke ranah UKM memiliki kesamaan tujuan, yakni untuk meningkatkan efisiensi proses produksi sehingga dapat menekan biaya sehingga nilai jualnya menjadi murah tapi tetap berkualitas. Demikian juga dengan efektivitas dalam menjalankan usaha dan daya tanggap terhadap perubahan lingkungan serta teknologi, sehingga UKM memiliki daya saing dan dapat bertahan (*survive*).

Upaya pengembangan kapasitas UKM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 4 dapat dilakukan melalui dua hal yakni fasilitasi pengembangan usaha, dan pelaksanaan pengembangan usaha. Terkait fasilitasi pengembangan usaha yakni dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan desain serta teknologi. Sedangkan pelaksanaan pengembangan dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha dapat berupa usaha besar maupun UKM yang bersangkutan.

Domain yang merupakan bagian dari upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangan kapasitas UKM sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2013 adalah melalui :

- a. Membuka peluang untuk dapat ikut serta dalam lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Membuka ruang usaha khusus bagi UKM melalui pembatasan bagi Usaha Besar pada bidang usaha tertentu;

- c. Memberik kemudahan perizinan;
- d. Menyediakan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Mendukung penerapan teknologi informasi.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi penelitian, berdasarkan data awal dari beberapa sumber informasi yang dapat diperoleh telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengembangan kapasitas UKM. Misalnya dalam hal kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan (permodalan), fasilitasi teknologi dan informasi. Fasilitasi pembentukan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala terkait dengan hal tersebut.

Pada saat penelitian ini dilakukan tahun 2017, secara keseluruhan Kabupaten Bogor memiliki 26,532 UKM (LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bogor 2016). Dalam hal kuantitas, ini merupakan jumlah yang banyak dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 dan 2016. Namun dari segi kualitas dan daya dukungnya masih banyak mengalami kendala. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Industri Kecil Menengah (FKMIKM) Kabupaten Bogor Ace Sumanta yang mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi para pelaku UKM antaranya masalah permodalan, pemasaran hingga kesejahteraan, dan bahkan ada UKM yang terlilit utang “bank keliling” karena kekurangan modal usaha (antaranews.com, 2015).

Informasi serupa juga diperoleh dari dokumen RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, pada isu-isu strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Bogor disebutkan bahwa permasalahan yang terkait dengan UKM adalah belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga isu strategis tersebut dirumuskan ke dalam arah kebijakan strategi sebagai berikut:

- 1) peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan professional;
- 2) peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; dan
- 3) perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya hingga tahun 2017 masih terdapat beberapa kendala yang sama. Dalam kegiatan temu bisnis yang dihadiri oleh para pengusaha besar dengan pelaku UKM Kabupaten Bogor tahun 2015, Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Bogor pada waktu itu mengatakan permasalahan permodalan mendasari pertemuan ini. Menurutnya permodalan adalah masalah yang sudah sering diungkapkan namun sejauh ini belum bisa kita atasi secara maksimal, termasuk tingkat kepercayaan pasar kepada produk UKM kita juga masih rendah. Maka diharapkan sinergitas antara perusahaan besar dan UKM dapat terjalin. Selain itu, Bupati Bogor Hj. Nurhayanti dalam kunjungannya ke beberapa kecamatan juga masih menemukan sentra UKM yang masih belum tersentuh oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan, seperti di Kecamatan Ciampea ([bogorkab.go.id](http://bogorkab.go.id), 2015).

Permasalahan lainnya yang menjadi kendala dalam pengembangan UKM di Kabupaten Bogor terkait dengan kemampuan akses terhadap teknologi informasi. Dalam konteks kekinian hal ini menjadi penting, mengingat teknologi informasi dapat memudahkan UKM untuk mengakses berbagai informasi yang terkait diantaranya sistem permodalan, jaringan atau komunitas usaha, inovasi teknologi produksi, promosi dan pemasaran barang-barang hasil produksi, dan lain-lain. Sementara itu, UKM di Kab. Bogor umumnya masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam pemasaran. Sebetulnya Diskop UKM telah melakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut, namun belum menjangkau seluruh UKM, serta belum terintegrasi.

Disamping permasalahan sebagaimana diungkap di atas, cakupan bidang usaha yang terbuka untuk UKM yang sudah berjalan juga masih terbatas hanya pada usaha-usaha sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata, sementara potensi bidang usaha yang tidak kalah pentingnya di Kabupaten Bogor adalah bidang pertanian dan kehutanan. Sektor yang terakhir dimaksud merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Bogor. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJM Kab. Bogor yang menitik beratkan pada sektor unggulan yakni pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Selain hal tersebut, pertanian merupakan sektor primer yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Bogor.

Namun demikian, yang menjadi permasalahannya adalah kontribusi sektor pertanian tersebut belum memenuhi harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi PDRB menurut lapangan usaha tahun 2016-2017 sektor primer yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang 5,44 % dari total PDRB Kota Bogor (BPS Kab. Bogor 2017). Jika dilihat lebih jauh dalam hal kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten

Bogor secara umum sebesar Rp. 26,15 triliun atau berkontribusi sebesar 27,07 persen. Namun demikian, dari total 26,15 triliun kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, kontribusi sektor primer yang di dalamnya termasuk usaha bidang pertanian hanya sebesar Rp. 5,56 triliun, sementara sektor tersier berkontribusi sebesar 11,19 triliun atau sebesar 42,79 persen.

Berdasarkan data kontribusi PDRB tersebut, tampaknya bertolak belakang dengan kondisi Kabupaten Bogor itu sendiri yang memiliki wilayah pertanian yang menyebar pada setiap kecamatan, dan memiliki hasil pertanian yang beragam. LAKIP Kabupaten Bogor tahun 2016 terdapat data pengembangan zonasi wilayah pertanian dan non pertanian. Pada zona 1 yang terdiri dari Kecamatan Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, dan Gunungsindur merupakan zona industri pedesaan dan pengembangan UKM. Kecamatan Rancabungur yang menjadi lokus dalam penelitian ini memiliki lahan pertanian sebesar 300 ha lebih. Hasil pertanian dominannya adalah pepaya dan jambu biji dengan total produksi sebesar 243 ton pepaya serta 161 ton jambu biji pertahun. Kecamatan Rancabungur memiliki kelompok UKM bidang pertanian sebanyak 700 usaha, 40% diantaranya atau kurang lebih 280 usaha yang merupakan UKM bidang pertanian.

Potensi pertanian tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik. Banyak permasalahan yang menjadi kendala bagi petani dalam meningkatkan produksinya, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana produksi, permodalan, jaringan pemasaran, rendahnya hasil produksi, sampai dengan persoalan lahan pertanian yang semakin sedikit akibat konversi lahan. Sementara di sisi lain, jumlah permintaan pasar cukup tinggi, bahkan untuk kebutuhan ekspor ke Korea dan Rusia.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini berupa Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) UKM Bidang Pertanian di Kabupaten Bogor (studi di Kecamatan Rancabungur).

## **II. Kajian Pustaka**

### **1. Pemberdayaan**

Terminologi pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah empowerment yang berarti “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menurut (Suharto, 2005) menyebutkan: Pemberdayaan merujuk pada upaya peningkatan kemampuan orang, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya. (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

## **2. Pengembangan Kapasitas (*capacity building*)**

Brown secara sederhana mendefinisikan pengembangan kapasitas “*understood as the process of improving the ability of people, organizations and systems to achieve organizational objectives that have been set*” (Triana, 2013). Sedangkan Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terusmenerus (Milen, 2004). Pengertian lebih rinci tentang pengembangan kapasitas sebagaimana dikutip dari *UNDP (United Nations Development Programme)* dan *CIDA (Canadian International Development Agency)* dalam Milen adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Pengertian pengembangan kapasitas dari perspektif terminologi masih terdapat perbedaan dalam pendefinisian. Beberapa pakar mendefinisikan *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, yang berarti suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*) (Soeprapto, 2006). Selain itu, pengertian pengembangan kapasitas merujuk kepada *constructing capacity* sebagai usaha atau proses kreatif membangun kapasitas yang belum ada atau nampak (*not yet exist*).

Sementara itu, konsep pengembangan kapasitas menurut UNDP dalam Milen (Milen, 2004) fokus pada tiga dimensi, yaitu :

1. Tenaga kerja (dimensi *human resources*), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan
2. Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/ gedung.

3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.

### **III. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dimaksud karena penelitian ini ingin menggambarkan kondisi faktual peningkatan kapasitas UKM di Kabupaten Bogor, yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan persepsi informan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada informan dari para pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Bogor terutama yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, para pelaku UKM, serta dunia usaha lainnya yang merupakan mitra pemerintah dalam pengembangan UKM. Penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, dokumen, dan triangulasi. Sedangkan analisis data mengacu pada teori Mill & Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

Kabupaten Bogor adalah bagian di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi di bidang pertanian. Potensi tersebut ditunjang dengan letak Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Ibukota Negara yakni Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Bogor menjadi kawasan penyangga sekaligus penyuplai kebutuhan pokok sektor pertanian ke Provinsi DKI Jakarta.

Sektor UKM bidang pertanian Kabupaten Bogor memiliki andil terhadap perekonomian masyarakat dan juga sebagai penyedia lapangan kerja. Oleh karenanya, sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap UKM dalam beberapa tahun terakhir telah banyak meluncurkan program dalam pengembangan UKM, baik dananya bersumber dari Pemerintah Pusat maupun daerah guna meningkatkan produktivitas UKM. Sebagai gambaran nyata dari kondisi tersebut, dapat dilihat pada Semester 1 tahun 2017 peranan UKM secara umum dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp. 26,15 triliun atau berkontribusi sebesar 27,07 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor. (BPS Kab. Bogor)

Selanjutnya dapat dilihat kontribusi UKM khususnya bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sebesar Rp. 4,8 triliun atau berkontribusi sebesar 18,5 persen. Kontribusi ini tergolong kecil dibandingkan UKM sektor sekunder dan sektor tersier. Pada sektor sekunder, kontribusi terhadap PDRB adalah sebesar Rp. 9,4 triliun atau sebesar 36 persen, sedangkan sektor tersier jauh lebih besar yakni Rp. 11,1 triliun atau menyumbang PDRB sebesar 42,8 persen.

Selain hal tersebut, sektor UKM bidang pertanian di Kabupaten Bogor juga menjadi penyedia lahan pekerjaan terbesar keempat setelah sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa kemasyarakatan. Meski demikian, pengembangan sektor UKM Kabupaten Bogor masih memiliki banyak kendala dan permasalahan, hal ini dapat dilihat pada isu-isu strategis yang dikemukakan dalam RPJM Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang menunjukkan belum optimalnya usaha pemberdayaan UKM, seperti masih adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi, keterbatasan permodalan, akses terhadap teknologi masih terbatas, kemampuan entrepreneurship masih lemah, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya dukungan dari *stakeholders*.

Berdasarkan kendala-kendala yang menjadi isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor merumuskannya dalam misi yakni “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata”, dan selanjutnya dirumuskan dalam arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; serta Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia UKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk UKM.

Lebih jauh untuk melihat bagaimana pengembangan kapasitas UKM bidang pertanian di Kabupaten Bogor dengan menggunakan konsep UNDP yakni dalam hal pengembangan kapasitas tenaga kerja atau kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan kapasitas modal (dimensi fisik), dan pengembangan teknologi.

### **1. Pengembangan Kapasitas/kualitas Tenaga Kerja atau SDM**

Dimensi pengembangan kualitas SDM dibagi kedalam tiga bidang, yakni Pengetahuan (*knowledge*) yang bermakna informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal,

dan Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

**Pertama**, dalam konteks pengetahuan (*knowledge*). Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan dari UKM merupakan usaha-usaha tradisional dan berakar dari potensi-potensi sumber daya alam yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga untuk berdaya UKM masih memerlukan bantuan-bantuan pihak eksternal baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan besar melalui CSR-nya, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, urusan ini diatur secara jelas dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor. Dimana Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor memiliki fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah.

Dari data yang diperoleh di lapangan, Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas tenaga kerja di bidang UKM seperti pendidikan dan pelatihan (Diklat) manajemen, diversifikasi produk-produk pertanian, dan ini merupakan program rutin tahunan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan tenaga kerja yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor dalam bentuk pelatihan pengolahan produk unggulan termasuk dalam hal penggunaan peralatan teknologi yang merupakan sumbangan dari Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Rancabungur. Saat ini beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Rancabungur telah mampu melakukan pengolahan produk-produk hasil pertanian dalam berbagai varian, sehingga secara kualitas mampu memenuhi tuntutan pasar dan bahkan telah diekspor.

Namun sayangnya, peningkatan kemampuan pengolahan produk hasil pertanian tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi pertanian itu sendiri sebagai bahan baku olahan. Disini diperlukan sinergitas antara dinas-dinas terkait khususnya Dinas Pertanian sehingga adanya peningkatan usaha UKM bidang pertanian.

Selanjutnya, pengembangan kapasitas tenaga kerja UKM bidang pertanian dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Karena memasuki era digital atau lazim disebut revolusi industri 4.0 saat ini, dapat dipastikan hampir semua sektor usaha telah melibatkan teknologi informasi. Maureen sebagaimana dikutip oleh Dyan P

(2013) menyebutkan bahwa TIK dapat memperbaiki aksesibilitas petani dengan cepat terhadap informasi pasar, input produksi, tren konsumen, yang secara positif berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi mereka. Informasi pemasaran, praktek pengelolaan ternak dan tanaman yang baru, penyakit dan hama tanaman/ternak, ketersediaan transportasi, informasi peluang pasar dan harga pasar input maupun output pertanian sangat penting untuk efisiensi produksi secara ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, bentuk-bentuk kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja UKM yang terkait dengan TIK dapat berupa pendidikan dan pelatihan komputer dasar dan penggunaan internet, sedangkan pada tingkat lanjut berupa latihan pembuatan website dengan konten sederhana dan perawatan website. Namun kegiatan dimaksud sejauh ini belum dilakukan.

Pengembangan kapasitas tenaga kerja bukan saja ditujukan kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja saja, akan tetapi perhatian terhadap hak-hak para tenaga kerja juga harus diperhatikan dengan baik, seperti pemberian upah/gaji dan upah yang layak, kondisi lingkungan kerja, dan lain lain.

Sementara itu, pemberian upah/gaji para pekerja disektor UKM tidak sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengingat tidak semua UKM bergerak pada sektor usaha formal, akan tetapi sebagian besar UKM bergerak pada sektor informal seperti usaha perorangan, pedagang kakilima, dan industri rumah tangga yang umumnya memiliki sifat sebagai pengrajin yang belum berorientasi wirausaha. Disamping itu, keterbatasan modal dan lingkup usaha UKM yang relatif kecil juga berdampak terhadap kemampuannya membayar gaji/upah kepada para pekerjanya. Sehingga dengan kondisi seperti ini tentunya akan sulit untuk menetapkan standar dan mengontrol sistem pemberian gaji/upah para pekerja. Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah dengan melakukan pendampingan dan himbauan secara langsung kepada para pelaku UKM agar memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Akan tetapi dengan jumlah UKM yang mencapai 20 ribu lebih menjadi tantangan sendiri bagi Dinas Koperasi UKM untuk melakukan hal tersebut.

**Kedua** Keterampilan (*skill*). Keterampilan yang dimaksud di sini merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Kategori skill yang dibutuhkan pada sektor UKM diantaranya adalah *Technical Skill* Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer, alat digital, dan termasuk penggunaan alat-alat produksi lainnya.

Keterampilan seperti ini dapat diperoleh dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pihak lainnya seperti perusahaan. Adapun pihak perusahaan yang ikut membantu selama ini adalah seperti PT. Telkom dalam hal penggunaan teknologi informasi. Sementara Dinas Koperasi UKM melakukan pembinaan dalam bentuk keterampilan penggunaan alat-alat produksi, pelatihan menyusun pembukuan akuntansi sederhana. Akan tetapi upaya tersebut belum menyentuh semua UKM yang berjumlah kurang lebih 700 UKM di Kecamatan Rancabungur.

**Ketiga** Sikap (*attitude*). Sikap merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh para pekerja, karna dengan sikap yang baik dapat menumbuhkan hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan dan antara sesama pekerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kerjasama tim dalam meningkatkan produksi. Sikap seorang pekerja terhadap tempat dia bekerja juga akan menumbuhkan loyalitas dan etos kerja yang baik terhadap perusahaannya, akan tetapi bisa juga sebaliknya. Kondisi sikap seperti inilah yang dibutuhkan oleh UKM dalam menjalankan usahanya. Kendalanya adalah umumnya UKM merupakan sector usaha informal, sehingga hal-hal terkait dengan sikap para pekerja jarang menjadi perhatian. Namun Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor tetap berupaya memberikan pemahaman ini melalui kegiatan pelatihan tentang penanaman nilai-nilai etika dalam usaha, dan motivasi.

## **2. Pengembangan Kapasitas Permodalan**

Termasuk dalam unsur permodalan adalah modal (anggaran), sarana material, peralatan, dan gedung/ruang.

**Pertama** modal (anggaran). Pada dasarnya modal anggaran dalam pengembangan kapasitas UKM menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa anggaran yang memadai dapat dipastikan UKM tidak dapat berkembang. Apalagi UKM yang merupakan usaha kecil dan menengah yang umumnya didirikan oleh pengusaha-pegusaha dengan modal kecil dan terbatas. Untungnya dalam aspek modal lain seperti ketersediaan bahan baku yang murah begitu melimpah, dan itu merupakan modal utama UKM. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan persaingan pasar yang semakin terbuka dan modern tentunya dibutuhkan pengembangan-pengembangan dan inovasi produk, sehingga membutuhkan biaya yang besar pula.

Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri melalui Dinas Koperasi UKM telah membuat program yang terkait pemberian bantuan modal bagi UKM namun masih terbatas. Namun demikian, terkait dengan bantuan permodalan pihak Dinas Kopersi UKM juga membantu memfasilitasi atau menjembatani antara pihak UKM dengan Bank. Fasilitasi tersebut

biasanya dilakukan dalam forum resmi kerjasama atau melalui kegiatan sosialisasi. Namun yang disayangkan oleh pihak UKM adalah tidak adanya keringan bunga pinjaman, atau dengan kata lain pinjaman yang diberikan kepada UKM sama dengan pinjaman konvensional biasa lainnya. Dengan kondisi seperti itu, pada akhirnya para pelaku UKM mencari solusi praktis lain dalam permasalahan permodalan, seperti lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi, dan para rentenir. Sehingga yang terjadi kemudian adalah para pelaku UKM terjebak dengan hutang, ada sebahagian yang gagal membayar hutang pada akhirnya bangkrut.

**Kedua** Sarana Material. Material merupakan salah satu dari komponen dari sarana manajemen. Kebutuhan material tentunya sesuai dengan organisasi usaha masing-masing. Dalam hal pengembangan UKM, material yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan bahan baku atau setengah jadi (*raw material*) berupa produk hasil pertanian dalam bentuk bahan baku mentah atau belum diolah.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bahan baku yang dibutuhkan untuk UKM sektor pertanian di Kecamatan Rancabungur masih dapat dipenuhi dengan baik untuk beberapa jenis produk pertanian, seperti jambu Kristal yang merupakan produk unggulannya, pepaya, pisang, ubi jalar, dan padi. Namun demikian, jumlah produksi bahan baku tersebut tidak bertambah secara signifikan setiap tahunnya dikarenakan faktor lahan yang ada semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Lahan pertanian sebagaimana telah diungkap di atas, semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan sektor properti di Kabupaten Bogor.

**Ketiga** Peralatan. Peralatan menjadi kebutuhan penting bagi UKM dalam usaha produksinya, apapun jenis UKM. Peralatan dapat berupa mesin, peralatan produksi lainnya, termasuk kendaraan. Kebutuhan peralatan tentunya disesuaikan dengan skala produksi UKM tersebut, tapi umumnya yang diketahui adalah UKM sektor pertanian skala produksinya relatif kecil. Sehingga peralatan yang dibutuhkannya pun juga tidak banyak, bahkan sebagian besar masih dilakukan dengan cara tradisional. Namun demikian, UKM dalam skala apapun sebenarnya tetap membutuhkan sentuhan peralatan yang lebih modern dan memadai untuk meningkatkan produksinya.

Kebutuhan peralatan merupakan tantangan utama yang dirasakan oleh UKM sektor pertanian di Kecamatan Rancabungur. Sejauh ini Dinas Koperasi UKM sebagaimana diakui oleh Kepala Dinas telah memberikan beberapa bantuan berupa peralatan, namun dirasakan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Karena UKM sektor pertanian sangat beragam jenisnya sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Rancabungur.

**Keempat** Ruang/gedung. Lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan menciptakan kinerja yang optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas. Namun yang menjadi permasalahan-nya adalah umumnya UKM bersifat tradisional dan tidak memiliki rumah produksi yang terstandar. Usaha atau produksi hanya bersifat rumahan, sehingga tidak ada standar ruang atau tempat kerja. Hal tersebut dapat dikecualikan bagi UKM yang skala produksinya lebih besar dan sudah memiliki tempat usaha atau rumah produksi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terutama UKM sektor pertanian di Kecamatan Rancabungur umumnya bersifat tradisional dan merupakan industri rumahan. Seperti usaha kripik singkong, kripik pisang, ranginang, kembang goyang, pastel abon lele (cendol lele, neget lele, dan baso lele), pangsit, termasuk usaha jambu Kristal keseluruhannya merupakan usaha rumahan, walaupun ada sebagian diantara usaha tersebut dengan skala produksi yang lebih besar, namun tidak memiliki tempat usaha secara khusus seperti pabrik.

Walaupun demikian, sebenarnya UKM tetap memerlukan tempat-tempat usaha yang memadai agar dapat meningkatkan produksinya, termasuk menyediakan outlate tempat memasarkan produk olahan UKM, namun sayangnya belum ada. Terkait dengan pemanfaatan ruang, bukan hanya ruang yang bersifat indoor (di dalam) akan tetapi juga ruang outdoor (di luar gedung) atau ruang terbuka yang dimanfaatkan untuk usaha. Hal yang menarik adalah seperti apa yang dilakukan di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur dalam memanfaatkan ruang terbukanya sebagai kawasan usaha terpadu atau yang disebut dengan agro edu wisata (agro bisnis, edukasi, dan wisata). UKM bidang pertanian khususnya jambu kristal yang ada di Desa Bantarsari saat ini mengembangkan usaha dengan memadukan tiga aspek sekaligus, yakni usaha pertanian, wisata, dan pendidikan (edukasi) yang terkait pertanian, dengan luas area saat ini sebesar 5 hektar.

### **3. Pengembangan Kapasitas Teknologi**

Dalam konteks pengembangan kapasitas teknologi sektor UKM ini ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan yakni terkait kemampuan terhadap akses informasi, dan penerapan system informasi manajemen.

**Pertama** Kemampuan Terhadap Akses Informasi. Kemampuan terhadap akses informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan jaringan internet, dan penetrasi teknologi informasi dalam masyarakat serta para pelaku UKM.

Dalam hal kemampuan SDM terhadap akses informasi oleh pelaku UKM masih rendah, umumnya para pelaku UKM masih gagap teknologi (gaptek) yang bermakna masih awam terhadap teknologi. Apalagi teknologi informasi tergolong hal yang baru di lingkungan UKM, terlebih lagi para pelaku UKM umumnya merupakan generasi tua (*old generation*) yang jarang bersentuhan dengan teknologi tersebut. Padahal kemampuan terhadap akses informasi akan membuka peluang yang lebih luas dalam menjual produk-produk UKM itu sendiri, karena umumnya produk UKM hanya dijual di gerai-gerai yang ada disekitar desa itu sendiri.

Disamping itu, ketersediaan jaringan dan penetrasi internet di Kecamatan Rancabungur tergolong masih rendah, bahkan umumnya di Kabupaten Bogor. Hal ini dapat diketahui dari uji coba yang dilakukan oleh IndoTelko sebagaimana dikutip dari indotelko.com yang menyebutkan bahwa dari 5 (lima) operator yang diuji hanya 2 (dua) operator yang memiliki jaringan cukup kuat sampai ke pelosok desa.

**Kedua** Penerapan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Dalam konteks pengelolaan UKM, bagi sejumlah UKM dengan usaha skala kecil, dan belum menjalankan usahanya secara modern umumnya belum menggunakan SIM dalam operasionalnya. Beberapa faktor terkait adalah karena UKM tersebut merasa belum membutuhkan SIM, sumber daya manusia UKM yang belum mampu, keterbatasan peralatan, dan kekurangan biaya.

## **V. Kesimpulan**

**Pertama** Pengembangan Kapasitas/kualitas Tenaga Kerja atau SDM. Kapasitas/kualitas SDM UKM di Kecamatan Rancabungur umumnya masih rendah, terutama dalam hal kemampuan teknis pengolahan produk, penggunaan alat-alat produksi, dan pemasaran. Pengembangan kapasitas tenaga SDM sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM namun masih terbatas baik dari segi jumlah kegiatan maupun konten kegiatan, termasuk kegiatan pendampingan oleh para penyuluh. Sedangkan peran pihak swasta atau perusahaan besar dalam bentuk CSR juga dirasakan masih terbatas.

**Kedua** Pengembangan Kapasitas Permodalan. Bantuan permodalan dari pihak Pemerintah Daerah baik berupa modal dana maupun peralatan masih sangat sedikit. Demikian juga halnya dengan pihak perbankan sebagai pemilik modal tidak memberikan kemudahan fasilitas peminjaman bagi pelaku UKM, baik berupa pinjaman bunga rendah atau kemudahan dalam pengajuan pinjaman lainnya. Sementara itu,

beberapa UKM mengandalkan pinjaman terbatas dari beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN, tapi hal tersebut belumlah memadai.

**Ketiga** Pengembangan Kapasitas Teknologi. Pengembangan kapasitas teknologi dilihat dari dua aspek yakni terkait kemampuan terhadap akses informasi, dan penerapan sistem informasi manajemen. Dalam hal kemampuan terhadap akses informasi, UKM di Kecamatan Rancabungur sudah cukup bagus, karena umumnya hal tersebut dilakukan oleh para generasi milenial, namun yang menjadi kendala adalah justru dalam hal kemampuan pemanfaatan akses informasi tersebut untuk kebutuhan UKM yang masih rendah, seperti untuk keperluan pemasaran dan promosi.

Demikian juga halnya dalam penerapan sistem informasi manajemen yang masih rendah. Karena umumnya UKM di Kecamatan Rancabungur belum menjalankan manajemen secara modern dan juga dikarenakan skala usahanya yang masih kecil, sehingga para pelaku UKM merasa belum memerlukan penerapan sistem informasi manajemen.

## **VI. Daftar Pustaka**

- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.
- Hilderbrand, M. E., & Grindle, M. S. (1997). Getting good government : capacity building in the public sectors of developing countries. In *Getting good government : capacity building in the public sectors of developing countries*.
- Milen, A. (2004). Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. *Diterjemahkan Secara Bebas*. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Soeprapto, H. R. R. (2006). The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance. *Chest*, 25(1).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Triana, R. (2013). jgp. *Capacity Building in Local Government, Volume 4*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/issue/view/11>

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-20-tahun-2000/pemberdayaan-masyarakat-dalam-bidang-ekonomi---oleh-mardi-yatmo-hutomo/>

[digilib.unila.ac.id/11424/15/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11424/15/BAB%20II.pdf)

<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).